

DEKLARASIKAN PEMILU DAMAI

Gubernur DIY Pertemukan Seluruh Parpol

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X akan mengundang semua partai politik (parpol) peserta Pemilu di DIY. Pertemuan itu guna meminta komitmen seluruh parpol untuk mewujudkan Pemilu kondusif, damai, aman dan nyaman di DIY.

Termasuk selama masa tahapan kampanye yang akan berlangsung mulai akhir November mendatang. Rencananya pertemuan dengan parpol itu dilakukan setelah bakal calon legislatif (bacaleg) resmi menjadi daftar calon tetap (DCT).

"Nanti kalau sudah ada, calonnya sudah resmi. Nah saya baru akan mengundang partai-partai politik untuk bersama-sama mendeklarasikan (Pemilu) aman nyaman di Yogya. *Saiki* masih bakal calon (bacaleg) kok, belum resmi. Nanti saja kalau sudah resmi dan terdaftar ke KPU (saya undang partai)," kata

Gubernur DIY di Kepatihan, Yogyakarta, Senin (23/10).

Sultan mengatakan, pihaknya belum menentukan jadwal terkait rencana pertemuan tersebut. Sebab tahap pendaftaran dan penetapan calon presiden dan calon wakil presiden maupun bacaleg masih berlangsung. Jadi rencananya pertemuan itu baru akan diadakan apabila KPU secara resmi telah menetapkan seluruh capres dan cawapres maupun caleg yang akan berkontestasi dalam Pemilu. "Nanti lah kalau sudah resmi, *wong* sekarang *kabeh* masih bakal calon kok," ujar Sultan. Sedangkan Ketua Badan



KR-Riyana Ekawati
Sultan HB X

Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY Mohammad Najib mengatakan, pihaknya akan mempertemukan para pengurus partai dan organisasi sayap partai untuk mengantisipasi terjadinya konflik antarsimpatisan sepanjang masa kampanye Pemilu 2024. Upaya mitigasi awal diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik selama masa

kampanye. Terlebih konflik yang melibatkan organisasi sayap partai sering terjadi di lapangan.

"Biasanya konflik rawan terjadi ketika simpatisan berangkat atau pulang dari acara kampanye di suatu lokasi. Simpatisan biasanya mengadakan pawai dan arak-arakan kendaraan menuju titik kampanye," ungkapnya.

Menurutnya, sebenarnya bentuk kampanye seperti itu bukan bagian dari bentuk kampanye yang diatur dalam Pasal 280 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sehingga bukan menjadi kewenangannya (Bawaslu) untuk melakukan pengawasan di lapangan. Adapun kewenangan Bawaslu DIY adalah mengawasi praktik pelaksanaan kampanye di lapangan, gedung maupun dalam pertemuan-pertemuan. **(Ria)-d**

BI LUNCURKAN BUKU KSK EDISI 41

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan

SOLO (KR) - Bank Indonesia (BI) kembali meluncurkan Buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) Edisi 41 dan Seminar Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) di Hotel Alila, Solo, Senin (23/10). Kegiatan ini diikuti perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah, ISEI, perbankan/lembaga keuangan dan akademisi.

"Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) harus diupayakan tetap terjaga dengan sinergi dan kolaborasi antara Bank Indonesia dengan seluruh pemangku kepentingan. Dalam menjaga SSK terdapat tantangan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global," kata Deputy Gubernur Bank Indonesia Judo Agung.

Menurut Yuda, ketidakpastian tersebut muncul sebagai dampak kondisi politik di Timur Tengah (konflik Palestina dan Israel) dan belum berakhirnya konflik Rusia dengan Ukraina. Kondisi tersebut mendorong naiknya har-



KR-Istimewa
Deputy Gubernur BI Judo Agung menyerahkan buku Kajian KSK Edisi 41 kepada perwakilan institusi.

ga energi dan pangan dunia, termasuk di Indonesia. Ketidakpastian tersebut juga mendorong Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga yang berdampak pada volatilitas arus modal asing yang gilirannya mendorong melemahnya nilai tukar (kurs) rupiah (Rp) terhadap dollar AS.

"Salah satu upaya Bank Indonesia agar nilai tukar stabil maka suku bunga acuan (BI7DRR) pada Oktober di-

naikkan 0,25 bps menjadi 6,00 persen. Stabilitas kurs diperlukan untuk mendukung SSK," tegas Yuda.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M Juho menyatakan, stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan saling interdependensi. Kedua variabel tersebut saling bergantung, artinya stabilitas makroekonomi membutuhkan stabilitas keuangan dan sebaliknya stabilitas keuangan membutuhkan stabilitas makroekonomi. **(Ria)-d**

Periksa

Dewan Etik MK. Namun, karena kelemahannya sekarang adalah MKMK, jadi memungkinkan beliau untuk menjadi anggota MKMK," tuturnya.

Selanjutnya adalah Wahiduddin Adams yang kini masih menjabat sebagai hakim konstitusi aktif di MK. "Saat ini sudah ada tujuh laporan yang masuk ke MK dari berbagai kelompok masyarakat dan advokat mengenai dugaan pelanggaran ko-

de etik hakim MK dalam memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023," kata Enny.

Dalam perkara tersebut, Senin (16/10), MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden diubah menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. MK mengabulkan seba-

gian Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia (WNI) bernama Almas Tsaiqibbiru Re A asal Kota Surakarta, Jawa Tengah. Almas memohon syarat pencalonan capres dan cawapres diubah menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. **(Ant/Has)-d**

Sambungan hal 1

Usia

UU Pemilu yang memperlakukan usia capres dan cawapres, mulai dari soal terlalu muda hingga terlalu tua. Meski demikian, Prabowo menegaskan, biarlah demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan rakyat memilih yang terbaik.

Sebelumnya, MK menolak gugatan uji materi UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia capres dan cawapres maksimal 70 tahun.

"Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Gedung MK RI, Jakarta, Senin (23/10).

Gugatan uji materi dalam perkara No 102/PUU-XXI/2023 itu diajukan tiga warga negara Indonesia (WNI) bernama Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari dan Rio Saputro, yang diwakili 98 orang ad-

vokat tergabung dalam Forum Aliansi '98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan Hak Asasi Manusia'.

Dalam gugatan para pemohon mengajukan dua pokok permohonan. Pertama, memohon MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan".

Kedua, memohon Pasal 169 huruf d UU Pemilu mengatur norma tambahan menjadi "tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran HAM yang berat masa lalu, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan

orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi serta tindak pidana berat lainnya".

Dalam putusan mengenai batas usia maksimal capres-cawapres menjadi 70 tahun, MK berkesimpulan, permohonan tersebut telah kehilangan objek, karena Pasal 169 huruf q UU Pemilu telah memiliki pemaknaan baru sebagaimana putusan MK terbaru pada tanggal 16 Oktober 2023.

"Pokok permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah kehilangan objek," kata Anwar membacakan konklusi. **(Ful)-d**

Sambungan hal 1

HUT PBB

PBB untuk membahas konflik tersebut. MU PBB telah mengeluarkan resolusi yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Sedangkan DK PBB telah mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata.

Namun upaya PBB tidak efektif mengurangi tensi perang Rusia-Ukraina. Hingga saat ini, perang telah berlangsung lebih dari 1,5 tahun. Pembahasan di DK PBB cenderung menemui jalan buntu. Veto Rusia menjadi salah satu penyebab. Selain unsur pertentangan kepentingan antara Rusia dan Amerika Serikat (AS).

Perang Israel-Palestina yang berlarut-larut telah menjadi monumen kegagalan PBB. PBB memang telah mengakui Palestina sebagai negara pengamat sejak 2012. Organisasi internasional itu juga telah membentuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) untuk membantu para pengungsi Palestina. Palestina dapat memanfaatkan dukungan PBB untuk memperkuat posisinya dalam negosiasi perdamaian dengan Israel.

Meskipun demikian, kepentingan AS dan negara-negara dunia, kurang mampu meningkatkan kapasitas strategis Palestina ketika berhadapan dengan Israel. Berbagai persoalan domestik dan tekanan politik/militer Israel telah menem-

patkan Palestina pada posisi asimetris dengan Israel.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan PBB sulit menjadi juru damai bagi perang Rusia-Ukraina dan perang Israel-Palestina. *Pertama*, kenyataan menunjukkan, tidak semua negara anggota PBB memiliki kepentingan yang sama dalam konflik Rusia-Ukraina dan perang Israel-Palestina. Salah satunya adalah perbedaan cara mencapai perdamaian. Hal ini menghambat upaya PBB untuk mencapai kesepakatan.

Kedua, kepemilikan hak veto di DK PBB oleh Rusia dan AS. Akibatnya, kedua negara cenderung memblokir resolusi-resolusi yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka. *Ketiga* adalah kompleksitas konflik. Konflik Rusia-Ukraina dan perang Israel-Palestina memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks. Hal ini membuat penyelesaian konflik tersebut menjadi sulit dan membutuhkan waktu yang lama.

Walaupun begitu, PBB sebagai sebuah organisasi internasional tetap memiliki struktur kesempatan untuk membangun perdamaian di dua konflik besar dan berkepanjangan. PBB perlu menegaskan perannya sebagai mediator dalam negosiasi antara Rusia-Ukraina dan antara Palestina-Israel.

Sejak berdiri 24 Oktober 1945, PBB memiliki pengalaman dan keahlian yang

dapat membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. PBB harus melihat perdamaian itu dalam konteks ketiadaan perang atau *negative peace*. Selain itu, perdamaian itu perlu diarahkan menuju terciptanya kondisi dimana pemenuhan hak asasi sebagai hak dasar manusia atau *positive peace*. Caranya, meningkatkan upaya bantuan kemanusiaan kepada para korban perang di Ukraina dan pengungsi Palestina. Juga mendorong dialog dan kerja sama antara Rusia-Ukraina dan antara Palestina-Israel.

Upaya lain adalah mereformasi DK PBB. Salah satu isu besar dalam reformasi ini adalah mengurangi pengaruh veto negara-negara adidaya. Ada kecenderungan bahwa hak veto justru telah menjauhkan upaya-upaya damai. Konflik-konflik semakin berkepanjangan dan sulit diselesaikan ketika konflik itu melibatkan negara-negara pemilih veto DK PBB.

Kegagalan PBB menjadi juru damai bagi perang Rusia-Ukraina dan perang Israel-Palestina merupakan kenyataan pahit, bahwa diplomasi memiliki keterbatasan. Kenyataan ini menjadi tantangan di hari ulang tahun PBB dalam upaya membangun perdamaian dunia.

(Penulis adalah Dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional eVeterani Yogyakarta)-d

Sambungan hal 1

Prabowo

Kedua, rapimnas menyepakati hal-hal yang bersifat teknis dalam menghadapi Pemilu 2024. Salah satunya, pendaftaran Prabowo-Gibran Rabu (25/10) di KPU. Rapimnas dihadiri seluruh pengurus Partai Gerindra di tingkat pusat hingga daerah. Gibran dalam rapimnas tersebut tak datan, lantaran sedang berada di Kota Solo.

Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan, partainya dipastikan solid dalam mengusung Prabowo-Gibran. Pasalnya, Gerindra sudah

menyerahkan mandat terkait sosok cawapres kepada ketua umum yang juga Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Prabowo mengatakan parpol anggota KIM langsung melakukan konsolidasi di internal masing-masing usai menetapkan dirinya dan Gibran sebagai bakal pasangan capres-cawapres.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Rapimnas Partai Gerindra kemarin, bertujuan memantapkan kemenangan Prabowo-Gibran. **(Ant/Obi)-d**

Sambungan hal 1

Pimpinan

Hal senada disampaikan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo yang meminta pimpinan KPK kooperatif untuk menghadirkan Ketua KPK Firlil Bahuri dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai saksi dugaan pemerasan di Kementerian Pertanian. "Pimpinan KPK bukan hanya menyampaikan ketidakhadiran Firlil kemarin, Jumat (20/10), tetapi juga harus kooperatif menghadirkan Firlil Bahuri ke Polda Metro Jaya, agar jangan mangkir lagi," katanya di Jakarta.

Menurut Yudi, pimpinan KPK memiliki tanggung jawab untuk membawa dan memastikan Firlil Bahuri hadir memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dan diperiksa. Absensi Firlil Bahuri pada panggilan pertama

menjadi insiden memalukan bagi lembaga antirasuah tersebut. "Insiden mangkirnya Ketua KPK Firlil Bahuri pada Jumat lalu sangat memalukan muruah KPK sebagai lembaga penegak hukum, yang seharusnya patuh hukum," tegasnya.

Yudi juga mengingatkan bahwa siapa pun yang berusaha merintang upaya penyidikan polisi bisa dikenakan pidana sesuai Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun. "Oleh karena itulah, diharapkan semua pihak kooperatif agar penuntasan kasus ini cepat tuntas sebagai bagian upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," pungkasnya. **(Ant/Has)-d**

Sambungan hal 1

Presiden

Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para dubes tersebut di Indonesia. Setelah menyerahkan surat kepercayaan, para dubes beserta pendamping masing-masing berpamitan diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Para dubes negara sahabat tersebut bertekad memperkuat hubungan dan kerja sama bilateral dengan Indonesia di sejumlah bidang, seperti perdagangan, investasi, perubahan iklim, dan pendidikan.

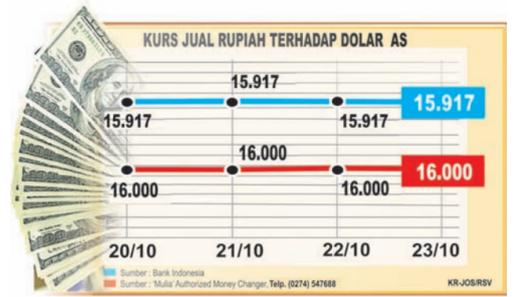
Dubes LBBP Designate Resident Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara Dominic James Robert Jermy menyampaikan, persahabatan negaranya dengan Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Ia bertekad terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia di bidang perdagangan, investasi, perubahan iklim, dan pendidikan.

"Saya tahu sumber daya

manusia Indonesia prioritas nomor satu untuk Pak Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, prioritas untuk saya itu hubungan terkait dengan pendidikan juga. Saya sangat

menantikan kolaborasi kita selanjutnya dan saya siap bekerja sama dengan mitra dan teman-teman dari Sabang sampai Merauke," kata Dominic. **(Ant/San)-d**

Sambungan hal 1



Prakiraan Cuaca Selasa, 24 Oktober 2023

Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Cerah Berawan Udara Kabur Hujan Lokal Hujan Pelir



Ferri Wicaksono, SIP, MA.
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas AMIKOM Yogyakarta

GEGAP gempita menuju PEMILU presiden dan wakil presiden tahun 2024 semakin terasa. Koalisi partai politik mulai mendeklarasikan pasangan

Bagaimana Cara Memilih Pemimpin Negara?

capres cawapres yang diusungnya. Dibalik itu, di level akar rumput berbagai komunitas, paguyuban, hingga individual telah banyak menyatakan diri sebagai bagian dari relawan pasangan capres cawapres. Fenomena tersebut mengindikasikan kuatnya political awareness warga Indonesia. Tentu itu baik, mengingat negara lahir atas konsensus warga, maka warga lah yang mengawali bagaimana selanjutnya negara Indonesia dijalankan. Semua dimulai dari pilihan warga negara terhadap calon pemimpin negara.

Pemimpin diidentifikasi sebagai seseorang yang mempunyai kekuasaan. Didalam konteks negara, presiden diidentifikasi sebagai pemimpin negara.

Tidak salah, sebagaimana diatur didalam pasal 4 UUD 1945 disebutkan bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan dengan dibantu seorang wakil presiden. Selanjutnya pemerintahan didefinisikan sebagai organisasi pada suatu negara yang berisi orang-orang yang diberikan kekuasaan (sering disebut dengan HEMANG) menurut peraturan perundang-undangan untuk mengurus/ menjalankan urusan kenegaraan. Urusan utama negara sebagaimana konsep welfare state adalah menjamin kesejahteraan warganya.

Peran sentral presiden yang dibantu wakil presiden dalam menjamin kesejahteraan warga negara, tentu perlu disikapi dengan

cerdas oleh warga negara dalam memilih presiden dan wakil presiden. Lantas bagaimana cara kita memilih pemimpin negara? Didalam memilih pemimpin tidak salah jika kita harus egois. Perspektif utama yang perlu kita pegang adalah memilih pemimpin yang "menguntungkan kita" dan sama sekali "tidak merugikan kita". Selanjutnya perlu kita identifikasi aspek-aspek yang melekat pada diri calon pemimpin yang berpotensi "menguntungkan kita" warga negara. Pertanyaan yang perlu kita jawab yakni how to connect leaders with us? Kita bisa melakukan langkah-langkah berikut:

Pertama, mendekripsikan mimpi kita di masa kini dan masa yang akan datang. Terkadang seseorang ragu

untuk ber-mimpi, sementara dengan terwujudnya mimpi maka akan menjawab keragu-raguan seseorang. Oleh sebab itu, jangan ragu menentukan mimpi. Misal: Sederhananya, jika anda ingin selalu digratiskan untuk menempuh setiap jenjang pendidikan dan itu bisa membahagiakan anda sekaligus menjawab keraguan anda terhadap negara, maka pilih mimpi itu.

Kedua, mengidentifikasi kriteria pemimpin ideal menurut kita. Bisa dari aspek kepribadian, keahlian dan pengalaman yang dimiliki. Tanpa ragu perlu kita pikirkan kriteria pemimpin sesuai keinginan kita, bahkan kita tidak perlu khawatir jika kriteria tersebut tampak tidak realistis. Pastikan kriteria kita melekat

pada diri calon pemimpin dan mampu berkontribusi untuk mengabdikan mimpi kita sebelumnya.

Ketiga, menentukan kriteria prioritas. Perlu kita menentukan batasan pengecualian pada sebuah kriteria ideal pemimpin yang telah kita identifikasi. Kelemahan diantara para pemimpin adalah ketika tidak konsisten pada pilihan mimpi dan kriteria yang telah ditentukan. Maka perlu kita buat batasan pengecualian bahwa ada kriteria tertentu yang sifatnya "mutlak/tanpa kompromi".

Keempat, memilih pemimpin, yang sejalan dengan mimpi kita dan memenuhi kriteria ideal kita. Ya, tanpa semudah itu pada langkah keempat. Namun

tidak mudah untuk langkah pertama, kedua, hingga ketiga.

Tentu sebelum kita memilih pemimpin negara, kita perlu memastikan kapasitas kita sebagai pemimpin dengan memastikan "kita punya mimpi" dan "kita punya kriteria". Memilih pemimpin bukan saja soal menilai kapasitas pemimpin, namun lebih dari itu, yakni soal loyalitas kita terhadap negara. Jangan biarkan negara pada akhirnya mengecewakan kita, hanya karena kesalahan dimulai dari kita gagal memilih pemimpin negara. Sekian, semoga bermanfaat.

